



# RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana kerja (RENJA).

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan penyusunan RAPBD maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi dasar acuan pelaksanaan kinerja, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra PD, disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis PD dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2025.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025, diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi

penyelenggaraan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2025. Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhir kata, semoga Dokumen Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2025 ini dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh para pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terselenggara secara lebih terarah, efektif, efisien, akuntabel serta dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tasikmalaya, Juli 2024  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya,



**H. NURAEDIDIN, S.IP.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650504 198403 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-7
<b>Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	II-15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	II-16
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKP .....	II-29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	

	Masyarakat .....	II-5
<b>Bab III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	III-2
<b>Bab IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	IV-2
4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2025 .....	IV-3
4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 .....	IV-6
<b>Bab V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Tasikmalaya .....	II-2
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	II-15
Tabel 2.3	Matriks Dampak Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Pencapaian Program Nasional (TPB/SDGs) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	II-19
Tabel 2.4	Analisis SWOT .....	II-28
Tabel 2.5	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya .....	II-30
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya .....	II-48
Tabel 3.1	Prioritas dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya ...	III-3
Tabel 3.2	Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	III-5
Tabel 3.3	Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	III-5
Tabel 4.1	Sasaran dan Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya .....	IV-1
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2025 .....	IV-2
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 .....	IV-3

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja ..... I-4
- Gambar 1.1 Visi, Misi, Arahkan Presiden dan Agenda  
Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 . III-1

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Renja Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja Tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta program, kegiatan dan sub kegiatan untuk satu tahun ke depan. Rencana kerja merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Proses



penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

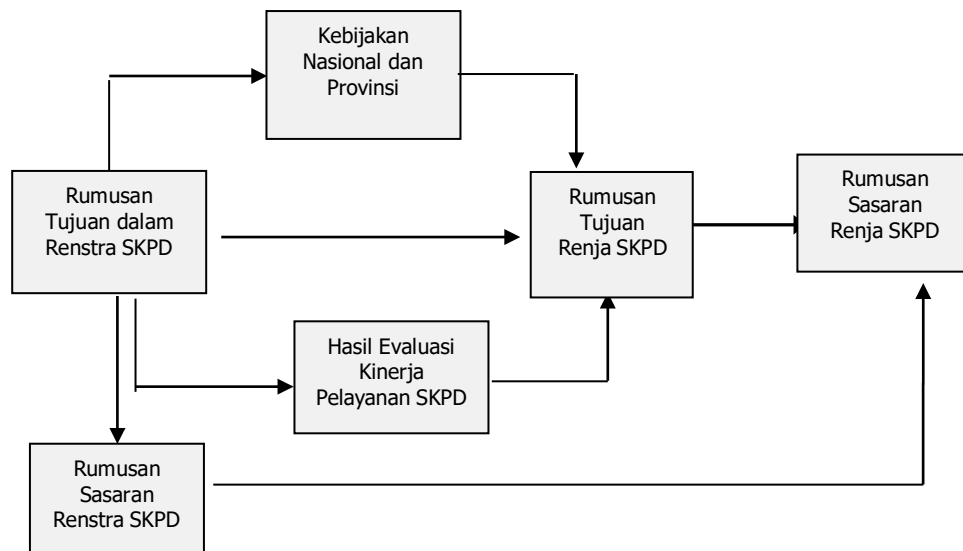
Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 disusun melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yaitu tahapan perumusan Rancangan Renja dan Tahapan penyajian rancangan Renja. Perumusan rancangan Renja SKPD dilakukan melalui

serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
5. Telaahan terhadap terhadap rancangan awal RKPDP
6. Perumusan tujuan dan sasaran
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
8. Perumusan kegiatan prioritas
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD
10. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD
11. Pembahasan forum SKPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah arahan menteri terkait.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah arahan menteri terkait. Tahapan proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1

**Gambar 1.1**  
**Tahapan Penyusunan Rencana Kerja**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya**



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 30)
16. Surat Edaran dari Bupati Tasikmalaya Nomor 006 Tahun 2024 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **A. Maksud**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah urusan Bidang Trantibumlinmas, yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025.

#### **B. Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Merumuskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2025, Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang trantibumlinmas tahun 2025.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyajian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja

pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasannya. Memuat catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya adanya rumusan program dan kegiatan baru serta besaran pagu anggaran yang berbeda yang disajikan dalam bentuk tabel.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan atau kecamatan yang disajikan dalam bentuk tabel.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu



penelaah yang menyangkut arah kebijakan proiritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Perangkat Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya :
  - 1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
  - 2) Prioritas Pembangunan Daerah;
  - 3) Pencapaian SDGs;
  - 4) Pengentasan kemiskinan;
  - 5) Pencapaian SPM;
  - 6) Pencapaian IKU;
  - 7) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah;
  - 8) Dan sebagainya, dapat ditambahkan sesuai dengan kondisi masing-masing.
  
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
  1. Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan;
  2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
  3. Jumlah keseluruhan kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
  4. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Pada bagian ini dipaparkan juga rekapitulasi program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan 9 (sembilan) prioritas pembangunan yakni :

1. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
  2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting;
  3. Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
  4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana;
  5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
  6. Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan;
  7. Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;
  8. Inovasi Pelayanan Publik;
  9. Peningkatan Kemandirian Desa.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut;
- d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangk at Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisa si Capaia n Progra m dan Kegiata n s/d Tahun berjala n (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11=10/ 4)
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
1	05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA</b>								

					<b>PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>										
1	05	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>48</b>	<b>47,68</b>	<b>50</b>	<b>69,8</b>	<b>146</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>Nilai IKM</b>	<b>77</b>	<b>83</b>	<b>74</b>	<b>84</b>	<b>101</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	05	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>78</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>46,15</b>	
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	3	3	3	100	3	2	66,67	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	7	10	10	100	10	4	40,00	

1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan administrasi keuangan sesuai kebutuhan</b>	<b>72</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>50,00</b>
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	12	12	12	100	12	6	50,00
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>cakupan pelayanan administrasi umum</b>	<b>100</b>	<b>91,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>50,00</b>
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	100	12	6	50,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72	12	12	12	100	12	6	50,00
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	7	12	12	100	12	6	50,00

1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	12	12	12	100	12	6	50,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	12	12	12	100	12	6	50,00
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>144</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>50,00</b>
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	12	12	12	100	12	6	50,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	12	12	12	100	12	6	50,00
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>312</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100</b>	<b>52</b>	<b>26</b>	<b>50,00</b>

1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	216	36	36	36	100	36	18	50,00
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	4	4	4	100	4	2	50,00
1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	72	12	12	12	100	12	6	50,00
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>persentase kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana</b>	<b>100</b>	<b>82,96</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>25,00</b>



1	053	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</b>	100	0	0	0	0	0	0	0,00
1	053	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	0	0	0	0	0	0	0,00
1	053	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</b>	100	89,66	100	100	100	100	45	45,00
1	053	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	6	1	0	0	0	0	0	0,00

1	0	0	2.0	000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokuemn Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	6	0	1	1	100	0	0	0,00
1	0	0	2.0	001	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	600	0	100	100	100	100	0	0,00
1	0	0	2.0	001	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	300	50	0	0	0	50	50	100,00

1	053	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	72	12	12	12	100	12	6	50,00
1	053	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Laporan dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>72</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>25,00</b>
1	053	2.03	0002	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	12	12	0	0	0	0	0	0,00

1	0 5	0 3	2.0 3	000 3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	10	10	10	10	100	10	5	50,00
1	0 5	0 3	2.0 4		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>jumlah laporan penguatan kelembagaan dalam penanganan pasca bencana</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	0 5	0 3	2.0 4	001 3	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	6	1	1	1	100	1	0	0,00

1	05	04			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	100	100	100	100	100	100	50	50,00
1	05	04	2.01		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan, Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	100	100	100	100	100	50	50,00
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	71	12	12	12	12	12	6	50,00

1	05	04	2.01	0002	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	72	12	0	0	0	0	0	0,00
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri secara berkala (setiap tahun), sah dan legal	72	12	0	0	0	0	0	0,00

1	054	2.01	0017	Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Serta Alat pelindung diri Sesuai Standar Teknis terkait	60	10	0	0	0	0	0	0	0,00
1	054	2.02		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Jumlah dokumen Pendataan dan Penilaian Sarana Proteksi Kebakaran</b>	<b>72</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	054	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan /Gedung/Lingkungan yang di Persaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	72	12	0	0	0	0	0	0	0,00

1	054	2.04			<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Jumlah Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, edukasi, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran setiap tahun nya</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	054	2.04	0002		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa /Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pamadam Kebakaran Pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran lingkungan ( SKKL ) setiap Tahunnya	351	351	0	0	0	0	0	0,00



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah dengan melakukan analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah didasarkan pada sasaran strategis, berikut sasaran strategis yang menjadi ukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

1. Meningkatnya ketangguhan daerah terhadap bencana;
2. Meningkatnya Kapasitas/ Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

Untuk menjabarkan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, dan target sasaran yang ditetapkan serta proyeksi untuk tahun 2021-2026, berikut tabelnya :

**Tabel 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya**

No	Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi 2023	Proyeksi Realisasi			Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Indeks Risiko Bencana	Poin	174,13	165,43	157,15	149,3	159,14	165,43	157,15	149,3	
2	Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	Poin	0,64	0,73	0,84	0,97	0,58	0,73	0,84	0,97	

## **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa “Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output)”.

Berdasarkan definisi dan penjelasan mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) dari peraturan diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan IKU sesuai dengan core business yang diemban. Adapun urusan yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dari kedua urusan ini telah dirumuskan IKU yang dirasa mewakili sasaran pada setiap urusan yang diemban. Adapun matrik dampak Kinerja Utama

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

## **2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:

- a. Keterbatasan Kompetensi SDM;
- b. Keterbatasan alokasi anggaran;
- c. Keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid;
- d. Keterbatasan alat analisis (simulasi) yang membantu terciptanya argumentasi logis dalam mendukung koordinasi dan komunikasi;
- f. Masih sedikit desa tangguh bencana;
- g. Belum terwujudnya keterpaduan antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga lainnya, dalam menindaklanjuti penanggulangan bencana, baik pada tahapan pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- h. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana;
- i. Belum dimilikinya secara keseluruhan dokumen rencana kontijensi untuk semua jenis bencana yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- j. Keterbatasan sarana prasarana penanggulangan bencana;
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana serta personil kebakaran;
- l. Belum optimalnya sinergitas penanggulangan bencana, baik pada tingkat daerah maupun nasional.

### **3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**

Mengacu pada permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam berjalannya tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan perangkat daerah, maka solusi dan pemecahan masalah yang ada menjadi penugasan yang secara langsung akan memberikan dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Pencapaian Program Nasional, berikut kami tampilkan Matriks TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals) untuk membantu menjelaskan dampak terhadap capaian dan visi misi Kepala Daerah maupun Program Nasional :

Tabel 2.3

Matriks Dampak Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Pencapaian Program Nasional (TPB/SDGs) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

KODE	INDIKATOR	TARGET (Perpres 59/2017)	CAPAIAN					TARGET				Status Ketercapaian	OPD/Dinas	Sumber Data			
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	TARGET 2023	TARGET 2025	TARGET 2030				TARGET 2035		
TPB 1	TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)																
Target 1.5	Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.																
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 10.000	(tidak ada dalam piram Perpres 59/2017)	235	18.266	3.865	2.876	422	410	390	340	288	238	188	Data Lenjkap	Sudah dilaksanakan dan belum tercapai (SB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD



	nca na sos ial yan g me nd apa t pe ndi dik an lay ana n kh usu s	ala m/b enc ana sosi al yan g me nda pat pen didi kan laya nana khu sus pad a tah un 201 9 me nja di 450 (20 15: 100 ).																
1. 5. 1. (e )	Ind eks risi ko be nca na pa da pus atp usa t per tu mb uh an yan g ber isik o tin ggi	Me nur unn ya ind eks risik o ben can a pad a pus at- pus at pert um buh an yan g ber isiko ting gi dari	203. 01	203. 01	203. 01	186. 51	174. 11	174. 13	157. 15	1 2 7 · 9 9	9 9 · 0 3	7 6 · 6 3	6 2 · 4 2	D ata L e n g k a p				Bad an Pen ang gula nga n Ben can a Dae rah





	gkat nasional dan daerah																	
<b>T P B 1 1</b>	<b>KOTA DAN PEMUKIMAN BERKELANJUTAN (MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN)</b>																	
<b>Ta rg et 1 1. 5</b>	<b>Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</b>																	
<b>1 1. 5. 1 *</b>	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 10.000 orang (orang)	(tidak ada dalam piramida Perpres 59/2017)	235	18.266	3.865	2.876	422	410	390	340	288	238	188	Data Lenjkap	Sudah dilaksanakan dalam Belumpai (SB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPB D	
<b>1 1. 5. 1. (a)</b>	Indeks Risiko Bencana	Menurunnya Indeks Risiko	203.01	203.01	203.01	186.51	222.8	174.13	157.15	127.99	99.03	76.63	62.42	Data Lenjg	Sudah dilaksanakan	Badan Penanggulangan		



et 1 1. b	<b>penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.</b>																
1 1. b. 2 *	Do ku me n str ate gi pe ng ura ng an risi ko be nca na (PR B) tin gka t da era h	(tid ak ada dala m lam pira n Per pre s 59/ 201 7)	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	D ata L en g ka p	Su da h dil aks an ak an da n su da h ter ca pai (SS )	Bad an Pen ang gula ng an Ben cana Da erah	
T P B 1 3	<b>PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM (MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA)</b>																
Ta rg et 1 3. 1	<b>Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</b>																
1 3. 1. 1 *	Do ku me n str ate gi pe ng ura ng an risi ko be nca na (PR B) tin	Me nur unn ya Ind eks Risi ko Ben cana a mel alui stra tegi pen gur ang an risik	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	D ata L en g ka p	Su da h dil aks an ak an da n su da h ter ca pai (SS )	Bad an Pen ang gula ng an Ben cana Da erah  BPB D	

	gkat nasional dan daerah	o bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.																	
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 10.000 orang (orang)	(tidak ada dalam piram Perpres 59/2017)	235	18.266	3.865	2.876	422	410	390	340	288	238	188	Data Lengkap	Sudah dilaksanakan belum tercapai (SB)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			

#### **4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah**

##### a. Tantangan

- 1) Semakin tingginya tuntutan penggunaan system informasi pada pelaksanaan birokrasi pemerintah;
- 2) Semakin meningkatnya tuntutan kinerja penanggulangan bencana;
- 3) Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya dalam penanggulangan bencana;
- 4) Perencanaan berbasis penanggulangan bencana belum optimal.

##### b. Peluang

- 1) Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana daerah;
- 2) Akselerasi penggunaan TIK secara optimal karena;
- 3) Penyeragaman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi Pemerintah Pusat yang akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi;
- 4) Keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana secara aktif;

#### **5. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan dapat dianalisa berdasarkan kondisi lingkungan yang ada. Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

##### i. Lingkungan Internal

###### a. Kekuatan (Strength)

- Adanya otonomi daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan kreasi di bidang kebencanaan;
  - Ketersediaan anggaran baik dari APBD Kabupaten, Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus.
- b. Kelemahan ((Weakness)
- Regulasi. Belum disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya yang memayungi pelaksanaan urusan Kebencanaan
  - Sumber Daya Manusia. Sangat terbatasnya jumlah personil serta masih rendahnya kompetensi personil;
  - Sarana dan prasarana. Minimnya sarana dan prasarana operasional Badan serta terbatasnya sarana prasarana untuk penanggulangan bencana

**Tabel 2.4**  
**Analisis SWOT**

	<b>MEMBANTU</b>	<b>MENGHAMBAT</b>
	<b>KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)</b>	<b>KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)</b>
<b>INTERNAL</b>	1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana	1. Keterbatasan kompetensi SDM; 2. Keterbatasan alokasi anggaran; 3. Keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid; dan 4. Keterbatasan alat analisis (simulasi) yang membantu terciptanya argumentasi logis dalam mendukung koordinasi dan komunikasi 5. Kurangnya konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang sebagai acuan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, lintas pemerintahan. 6. Perencanaan berbasis penanggulangan bencana belum optimal;
	<b>PELUANG (<i>OPPORTUNIT</i>)</b>	<b>ANCAMAN (<i>THREAT</i>)</b>

	<b>Y)</b>	
<b>EKSTERNAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja penanggulangan bencana daerah;</li> <li>2. Akselerasi penggunaan TIK secara optimal karena kondisi pandemi</li> <li>3. Penyeragaman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi Pemerintah Pusat yang akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi</li> <li>4. Keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana secara aktif;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sinergitas penanggulangan bencana, baik pada tingkat daerah maupun nasional</li> </ol>

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2025 yang disampaikan, telah dicermati oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menjelaskan keterkaitan sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta tentang Rencana Kerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan. Proses membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata melibatkan personil-personil yang terlibat dalam Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah. Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 seperti terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya</b>					<b>10.361.155.059</b>					<b>12.391.535.059</b>	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana</b>	<b>100</b>	<b>3.554.000.000</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana</b>	<b>100</b>	<b>3.554.000.000</b>	
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>	<b>100</b>	<b>500.000.000</b>	



	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	300.000.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	400.000.000	
--	---	------------------	---	---	-------------	---	------------------	---	---	-------------	--

	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	50	100.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	50	100.000.000	
--	---	------------------	---	----	-------------	---	------------------	---	----	-------------	--

	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>100</b>	<b>2.254.000.000</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>100</b>	<b>2.254.000.000</b>	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50	100.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50	100.000.000	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	1.764.000.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12	1.764.000.000	

	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20	90.000.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20	90.000.000	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100	300.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100	300.000.000	

	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>100</b>	<b>650.000.000</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>100</b>	<b>650.000.000</b>	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	550.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100	550.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	100.000.000	

	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		<b>Persentase Peningkatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>100</b>	<b>250.000.000</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		<b>Persentase Peningkatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>100</b>	<b>150.000.000</b>	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1	100.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	-	

	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikma laya	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50	100.000.00 0	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmal aya	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50	100.000.000	
--	---	-------------------------	---	----	-----------------	---	-------------------------	---	----	-------------	--

	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4	50.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4	50.000.000	
2	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	100	400.000.000	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>		<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	100	2.430.380.000	



	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Peningkatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Peningkatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>2.430.380.000</b>	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	100.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	100.000.000	

	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12	150.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	0	-
--	--	------------------	---	----	-------------	--	------------------	---	---	---

	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala (setiap tahun), Sah dan legal	1	100.000.000	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala (setiap tahun), Sah dan legal	1	250.000.000	
--	--	------------------	---	---	-------------	--	------------------	---	---	-------------	--

	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5	50.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5	50.000.000	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung Diri	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Serta Alat pelindung diri Sesuai Standar Teknis terkait	0	-	Pengadaan sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan kebakaran dan Alat pelindung Diri	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Serta Alat pelindung diri Sesuai Standar Teknis terkait		2.030.380.000	

<b>3</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>6.407.155.059</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>6.407.155.059</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>80.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>80.000.000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	50.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	30.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.724.155.059</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.724.155.059</b>	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	4.724.155.059	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	4.724.155.059	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>453.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>453.000.000</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	200.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	45.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	8.000.000	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	100.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	100.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	100.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>175.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>175.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	105.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	105.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	70.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	70.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>975.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>975.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	800.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35	800.000.000	



	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	75.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tasikmalaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	100.000.000	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan, dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan. Berikut tabel usulan pemangku kepentingan :

Untuk tahun 2025 Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak terdapat usulan apapun.

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025  
dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tasikmalaya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>N I H I L</b>				

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**



Gambar 3.1 Visi, Misi, Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa urusan yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan tugas dan fungsi, merujuk kepada Misi Nomor 7, yaitu “Perlindungan bagi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga” serta berorientasi kepada agenda pembangunan “Membangun lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim”.

Berdasarkan penjelasan diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat melakukan pembangunan berdasarkan visi, misi dan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Sehingga kesetiap pembangunan yang telah dilakukan berdasar atau sesuai dengan arah pembangunan nasional, menjadikan Kabupaten Tasikmalaya kontributor aktif terhadap capaian pembangunan yang ditetapkan pada kebijakan Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 yang hendak dicapai adalah “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”. Dalam mencapai visi tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan

4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Dalam tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka mesti mendukung Misi Ke-4 (Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global). Memperhatikan hal yang ada, maka tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Prioritas dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat daerah (Outcome)
1	P.4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	S.8 Meningkatkan Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya	I.14 Pertumbuhan Realisasi Investasi	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana
				Meningkatnya Kualitas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP
--	--	--	--	---	----------------------

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai prioritas pembangunan Daerah yaitu Prioritas ke 4 Mitigasi dan penanggulangan Bencana dengan sasaran daerahnya yaitu Sasaran ke 8 Meningkatkan Realisasi Investasi Kabupaten Tasikmalaya dengan indikator sasaran Daerahnya Pertumbuhan Realisasi Investasi oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana dengan indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana;
2. Meningkatnya Kualitas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan indikator Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah dengan indikator paningkatan Nilai Evaluasi SAKIP.

Dengan sasaran tersebut bertujuan pada Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dengan indikatornya yaitu Nilai Indeks Risiko Bencana dan Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat daerah	Target Kinerja Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Nilai Indeks Risiko Bencana	157,15 Poin
		Nilai Indeks Kapasitas/ Ketahanan Daerah	0,84 Poin

Dalam pencapaian tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 tersebut maka sasaran yang harus di laksanakan dapat terlihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Tasikmalaya**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Peningkatan Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Tertib Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	75 Poin

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026, yaitu “DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA” ditempuh melalui empat misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka dapat ditelaah dari Misi ke 4 (satu) yaitu “Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global”.

Selaku Perangkat Daerah yang mengemban Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mendukung Prioritas Pembangunan



sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah mendukung pada sisi prioritas daerah yaitu Mitigasi dan Penanggulangan Bencana.

#### 4.1 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang mendukung Prioritas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1  
Sasaran dan Program/Kegiatan  
Badan Penanggulanga Bencana Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya

No	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan
1	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana	Program :
		Penanggulangan Bencana
		Kegiatan :
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2	Meningkatnya Kualitas Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamata	Program :
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Kegiatan :
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

	n Non Kebakaran	
--	-----------------	--

Sasaran tersebut dilaksanakan untuk menunjang Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yaitu pada prioritas ke 4 “ Mitigasi dan Penanggulangan Bencana” yang tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2  
Rekapitulasi Program dan Kegiatan  
Berdasarkan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp)	Ket
1	P.4. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana		3.554.000.000	
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000	
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	100.000.000	
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.254.000.000	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	90.000.000	

				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	300.000.000	
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.764.000.000	
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	100.000.000	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		650.000.000	
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	550.000.000	
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100.000.000	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		150.000.000	
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	150.000.000	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			2.430.380.000	
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.430.380.000	

				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	250.000.000	
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	50.000.000	

Rumusan rencana Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 12.391.535.059,- (dua belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima puluh sembilan rupiah), Meliputi 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 26 SubKegiatan,

Sesuai Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2021-2026, maka rencana program dan kegiatan yang telah dirumuskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun 2025, dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan**  
**Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tasikmalaya**  
**Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian REN JA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target REN JA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								12.391.535.059,00							12.400.270.565,00	
	1							12.391.535.059,00							12.400.270.565,00	
	105							12.391.535.059,00							12.400.270.565,00	

1	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.407.155.059,00					-	6.980.270.565,00		
	1	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-	-	80.000.000,00	
	1	0	0	2.	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		5	1	0	0						3	50.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semu a Kcamatan	DANA TRANSFER UMU-M-DANA ALOKASI	-	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



	1	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.724.155.059,00			-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-	-	5.197.270.565,00	
	1	0	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	5	1	0	0	0															
				2	0															
				1	1															



						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	4.724.155.059,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-M-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-		5.197.270.565,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	453.000.000,00			-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan	-	-	453.000.000,00	



															Mitigasi dan Penanggulangan Bencana				
	1	0	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		5	1	0	0														
				6	0														
				5															
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	45.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semu Kacamata, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Mitigasi dan Penanggulangan	-		45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH













						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-		70.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-	-		-	975.000.000,00			-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan	-	-	1.075.000.000,00	

						han Daerah													Penanggulangan Risiko Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
	1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		5	1	0	0														
				9	0														
				1	1														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	800.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	-		900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH









							ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun								n Bencana						
	1	0	0	2.	0	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota															
		5	3	0	0																
				1	0																
				8																	
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun					1 Dokumen	400.000. 000,00	Kab. Tasik malaya, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Penguat an Sistem Perlind ungan Sosial dan Kesiapsi agaan Penang gulanga n Risiko Bencan a Mitigasi	-		450.000. 000,00	BADAN PENANGG ULANGA N BENCANA DAERAH





1	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																
	5	3	0	0					138	90.000.0	Kab.	DANA	-	Penguat	-		100.000.	BADAN			
			2	1		Jumlah			Unit	00,00	Tasik	TRANS		an			00,00	PENANGG			
				5		Peralatan					malaya,	FER		Sistem				ULANGA			
						Penyelamat					Semu	UMU		Perlind				N			
						an Diri bagi					a	M-		ungan				BENCANA			
						Individu					Keca	DANA		Sosial				DAERAH			
						Warga					mata	ALOK		dan							
						Negara,					n,	ASI		Kesiapsi							
						Keluarga,					Semu	UMU		agaan							
						maupun					a	M		Penang							
						Petugas					Kel/D			gulanga							
						sesuai					esa			n Risiko							
						dengan								Bencan							
						jenis								a							
						ancaman								Mitigasi							
						bencana di								dan							
						kawasan								Penang							
						tempat								gulanga							
						tinggalnya								n Bencan							
														a							
1	0	0	2.	0	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																
	5	3	0	0																	
			2	1																	
				8																	

						Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				100 Orang	300.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-	450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2.	0	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													
		5	3	0	0														
				2	2														
					6														

						Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	1.764.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2.	0	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
		5	3	0	0															
				2	2															
					8															

						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				1 Kawasan	100.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	-		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2.		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Tingkat Pemenuhan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-			100 %	650.000.000,00			-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan	-	-	1.100.000.000,00	

															Penang gulangan Risiko Bencan a Mitigasi dan Penang gulangan Bencan a							
	1	0	0	2.	0	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																
	5	3	3	0	0																	
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana					4	550.000. 000,00	Kab. Tasik malay a, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Penguat an Sistem Perlind ungan Sosial dan Kesiapsi agaan Penang gulangan Risiko Bencan a	-		900.000. 000,00	BADAN PENANGG ULANGA N BENCANA DAERAH		

															Mitigasi dan Penanggulangan Bencana				
	1	0	0	2.	0	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota													
		5	3	0	0														
				3	0					100	100.000.	Kab.	DANA	-	Penguatan	-		200.000.	BADAN
				9		Jumlah			Orang	000,00		Tasik	TRANS		Sistem		000,00	PENANGG	
						yang					malaya,	FER		Perlindungan				ULANGA	
						Mendapatk					a,	UMU		Sosial				N	
						an					Semua	M-		dan				BENCANA	
						Distribusi					Kecamatan,	DANA		Kesiapsiagaan				DAERAH	
						Logistik					ASI	ALOK		Penanggulangan					
						Penyelamatan					UMU	ASI		Risiko					
						dan					M	UMU		Bencana					
						Evakuasi								Mitigasi					
						Korban								dan					
						Bencana								Penanggulangan					

															n Bencana				
	1	0	0	2.		Penataan	-	-			-	150.000.			-	Penguatan	-	-	250.000.
		5	3	0		Sistem						000,00				an			000,00
				4		Dasar										Sistem			
						Penanggulan										Perlindungan			
						Bencana										Sosial			
																dan			
																Kesiapsiagaan			
																Penanggulan			
																Risiko			
																Bencana			
																a			
																Mitigasi			
																dan			
																Penanggulan			
																n			
																Bencana			
																a			

	1	0	0	2.	0	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota													
		5	3	0	0					1	150.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMU M-DANA ALOK ASI UMU M	-	Penguat an Sistem Perli ndungan Sosial dan Kesiapsi aga an Penang gulanga n Risiko Bencan a Mitigasi dan Penang gulanga n Bencan a	-		250.000.000,00	BADAN PENANGG ULANGA N BENCANA DAERAH



3	1	0	0		PROGRA M PENCEGA HAN, PENANGG ULANGAN  , PENYELA MATAN KEBAKAR AN DAN PENYELA MATAN NON KEBAKAR AN	-	-			-	2.430.38 0.000,00					-	2.800.00 0.000,00		
	1	0	0	2.	Pencegah an, Pengenda lian, Pemadam an, Penyelam atan, dan Penangan an Bahan Berbahay a dan Beracun Kebakara	-	-			-	2.430.38 0.000,00			-	Penguat an Sistem Perlind ungan Sosial dan Kesiapsi agaan Penang gulanga n Risiko Bencan a	-	-	2.800.00 0.000,00	

						n dalam Daerah Kabupaten/Kota								Mitigasi dan Penanggulangan Bencana					
	1	0	0	2.	0	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
		5	4	0	0														
				1	0					12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Tasikmalaya, Semu Kacamata, Semu Kel/Desa	DANA TRANSFER UMU M-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Mitigasi dan Penanggulangan	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



						Tahun), Sah, dan Legal								n Bencan a				
	1	0	0	2.	0	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran												
		5	4	0	0													
				1	0	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran			10 Orang	50.000.0 00,00	Kab. Tasik malaya, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	DANA TRANS FER UMU M- DANA ALOK ASI UMU M	-	Penguat an Sistem Perlind ungan Sosial dan Kesiapsi agaan Penang gulanga n Risiko Bencan a Mitigasi dan Penang	-		100.000. 000,00	BADAN PENANGG ULANGA N BENCANA DAERAH



															n Bencan a								
	<b>J U M L A H</b>										<b>12.391.5</b>									<b>12.400.2</b>			
											<b>35.059,0</b>									<b>70.565,0</b>			
											<b>0</b>									<b>0</b>			

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **a. Catatan Penting**

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

*Output* Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah Program Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja perangkat daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang

lebih baik dimasa datang.

Dengan demikian, diharapkan penyusunan Renja dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berjalan dengan baik, dan juga dapat mendorong dan mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya di tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk perbaikannya.

**b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pemabngunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang, UPTD dan seluruh staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a) Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.



2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Tasikmalaya, Juli 2024  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya,



**H. NURAEIDIN, S.IP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19650504 198403 1 001